



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp	5.312.548.123.255,90
2. Pendapatan Transfer.....	Rp	5.648.721.133.679,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.....	Rp	<u>4.018.968.000,00</u>
Jumlah Pendapatan.....	Rp	10.965.288.224.934,90
b. Belanja		
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai.....	Rp	2.529.375.704.900,00
b) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp	2.205.615.578.219,94
c) Belanja Bunga.....	Rp	2.786.684.555,00
d) Belanja Hibah.....	Rp	561.105.467.074,00
e) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp	<u>9.981.050.000,00</u>
		5.308.864.484.748,94
2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah.....	Rp	701.091.453,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	Rp	272.576.659.179,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	Rp	260.181.034.813,71
d) Belanja Modal jalan, irigasi dan Jaringan.....	Rp	699.678.969.706,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	66.149.063.496,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya..	Rp	<u>3.785.192.804,00</u>
	Rp	1.303.072.011.451,71
3. Belanja Tidak Terduga.....	Rp	82.301.295,00
4. Belanja Transfer		
a) Belanja Bagi Hasil.....	Rp	2.399.428.901.098,00
b) Belanja Bantuan Keuangan..	Rp	<u>1.896.976.798.838,25</u>
	Rp	4.296.405.699.936,25
Jumlah Belanja.....	Rp	10.908.424.497.431,90
Surplus/(Defisit).....	Rp	56.863.727.503,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan.....	Rp	154.808.628.910,91
2. Pengeluaran.....	Rp	<u>103.177.705.206,55</u>
Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp	51.630.923.704,36
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp	<u>108.494.651.207,36</u>

Pasal 2

Ringkasan lebih lanjut mengenai laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rincian mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada masing-masing perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Agustus 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	11.429.573.726.458,00	10.965.288.224.934,90	95,94	9.871.340.904.349,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.236.576.566.867,00	5.312.548.123.255,90	101,45	5.199.841.748.586,80
4.1.01	Pajak Daerah	4.421.557.653.495,00	4.744.701.180.376,87	107,31	4.649.349.674.256,16
4.1.02	Retribusi Daerah	7.484.658.673,00	8.225.836.940,00	109,90	13.182.254.856,40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.607.917.094,00	138.824.929.544,35	83,83	223.885.947.856,26
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	641.926.337.605,00	420.796.176.394,68	65,55	313.423.871.617,98
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.236.576.566.867,00	5.312.548.123.255,90	101,45	5.199.841.748.586,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	4.667.616.469.087,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	4.667.616.469.087,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	4.667.616.469.087,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
	JUMLAH PENDAPATAN	11.429.573.726.458,00	10.965.288.224.934,90	95,94	9.871.340.904.349,80
5	BELANJA DAERAH	11.613.884.803.146,00	10.908.424.497.431,90	93,93	9.653.373.230.507,08
5.1	BELANJA OPERASI	5.572.610.963.162,00	5.308.864.484.748,94	95,27	4.913.125.539.885,87
5.1.01	Belanja Pegawai	2.662.226.612.724,00	2.529.375.704.900,00	95,01	2.158.618.753.463,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.316.980.631.756,00	2.205.615.578.219,94	95,19	2.297.732.037.187,87
5.1.03	Belanja Bunga	2.900.000.000,00	2.786.684.555,00	96,09	8.817.133.280,00
5.1.05	Belanja Hibah	580.503.718.682,00	561.105.467.074,00	96,66	447.957.615.955,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	9.981.050.000,00	99,81	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.572.610.963.162,00	5.308.864.484.748,94	95,27	4.913.125.539.885,87
5.2	BELANJA MODAL	1.472.333.805.414,00	1.303.072.011.451,71	88,50	1.239.943.154.568,99
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.382.000.000,00	701.091.453,00	29,43	1.743.753.503,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.076.710.666,00	272.576.659.179,00	71,15	363.526.584.860,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.873.524.718,00	260.181.034.813,71	94,31	266.557.790.089,12
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	751.874.329.402,00	699.678.969.706,00	93,06	541.178.479.003,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.365.258.374,00	66.149.063.496,00	121,68	65.940.480.613,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.761.982.254,00	3.785.192.804,00	79,49	996.066.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.472.333.805.414,00	1.303.072.011.451,71	88,50	1.239.943.154.568,99
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	4.547.145.620.161,00	4.296.405.699.936,25	94,49	3.500.304.536.052,22
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.399.583.626.924,00	2.399.428.901.098,00	99,99	2.179.118.758.571,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.147.561.993.237,00	1.896.976.798.838,25	88,33	1.321.185.777.481,22
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	4.547.145.620.161,00	4.296.405.699.936,25	94,49	3.500.304.536.052,22
	JUMLAH BELANJA	11.613.884.803.146,00	10.908.424.497.431,90	93,93	9.653.373.230.507,08
	SURPLUS/DEFISIT	(184.311.076.688,00)	56.863.727.503,00	(30,85)	217.967.673.842,72
6	PEMBIAYAAN DAERAH	184.311.076.688,00	51.630.923.704,36	28,01	(63.159.006.432,81)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
	PEMBIAYAAN NETTO	184.311.076.688,00	51.630.923.704,36	28,01	(63.159.006.432,81)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	108.494.651.207,36	0,00	154.808.667.409,91

PALEMBANG, 29 Agustus 2025
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

c. Penutup

Demikian rincian penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sesuai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a final horizontal stroke ending in an arrowhead pointing to the right.

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	11.429.573.726.458,00	10.965.288.224.934,90	95,94	9.871.340.904.349,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.236.576.566.867,00	5.312.548.123.255,90	101,45	5.199.841.748.586,80
4.1.01	Pajak Daerah	4.421.557.653.495,00	4.744.701.180.376,87	107,31	4.649.349.674.256,16
4.1.02	Retribusi Daerah	7.484.658.673,00	8.225.836.940,00	109,90	13.182.254.856,40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.607.917.094,00	138.824.929.544,35	83,83	223.885.947.856,26
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	641.926.337.605,00	420.796.176.394,68	65,55	313.423.871.617,98
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.236.576.566.867,00	5.312.548.123.255,90	101,45	5.199.841.748.586,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	4.667.616.469.087,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	4.667.616.469.087,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,27	4.667.616.469.087,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00	3.882.686.676,00
	JUMLAH PENDAPATAN	11.429.573.726.458,00	10.965.288.224.934,90	95,94	9.871.340.904.349,80
5	BELANJA DAERAH	11.613.884.803.146,00	10.908.424.497.431,90	93,93	9.653.373.230.507,08
5.1	BELANJA OPERASI	5.572.610.963.162,00	5.308.864.484.748,94	95,27	4.913.125.539.885,87
5.1.01	Belanja Pegawai	2.662.226.612.724,00	2.529.375.704.900,00	95,01	2.158.618.753.463,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.316.980.631.756,00	2.205.615.578.219,94	95,19	2.297.732.037.187,87
5.1.03	Belanja Bunga	2.900.000.000,00	2.786.684.555,00	96,09	8.817.133.280,00
5.1.05	Belanja Hibah	580.503.718.682,00	561.105.467.074,00	96,66	447.957.615.955,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	9.981.050.000,00	99,81	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.572.610.963.162,00	5.308.864.484.748,94	95,27	4.913.125.539.885,87
5.2	BELANJA MODAL	1.472.333.805.414,00	1.303.072.011.451,71	88,50	1.239.943.154.568,99
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.382.000.000,00	701.091.453,00	29,43	1.743.753.503,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	383.076.710.666,00	272.576.659.179,00	71,15	363.526.584.860,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.873.524.718,00	260.181.034.813,71	94,31	266.557.790.089,12
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	751.874.329.402,00	699.678.969.706,00	93,06	541.178.479.003,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.365.258.374,00	66.149.063.496,00	121,68	65.940.480.613,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.761.982.254,00	3.785.192.804,00	79,49	996.066.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.472.333.805.414,00	1.303.072.011.451,71	88,50	1.239.943.154.568,99
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	4.547.145.620.161,00	4.296.405.699.936,25	94,49	3.500.304.536.052,22
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.399.583.626.924,00	2.399.428.901.098,00	99,99	2.179.118.758.571,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.147.561.993.237,00	1.896.976.798.838,25	88,33	1.321.185.777.481,22
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	4.547.145.620.161,00	4.296.405.699.936,25	94,49	3.500.304.536.052,22
	JUMLAH BELANJA	11.613.884.803.146,00	10.908.424.497.431,90	93,93	9.653.373.230.507,08
	SURPLUS/DEFISIT	(184.311.076.688,00)	56.863.727.503,00	(30,85)	217.967.673.842,72
6	PEMBIAYAAN DAERAH	184.311.076.688,00	51.630.923.704,36	28,01	(63.159.006.432,81)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00	154.808.628.910,91	53,51	322.795.834.055,19
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	103.177.705.206,55	98,26	385.954.840.488,00
	PEMBIAYAAN NETTO	184.311.076.688,00	51.630.923.704,36	28,01	(63.159.006.432,81)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	108.494.651.207,36	0,00	154.808.667.409,91

PALEMBANG, 2025
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

c. Penutup

Demikian rincian penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sesuai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke that ends in a small hook.

H. HERMAN DERU